

BAB 2

EXTRACTIVE INDUSTRY INITIATIVE (EITI) DAN PERKEMBANGANNYA

2.1 BERBAGAI INISIATIF TRANSPARANSI SEKTOR EKSTRAKTIF

Semenjak tahun 1999, komunitas internasional mulai mengakui perlunya penerapan aspek transparansi terutama di negara-negara yang kaya akan sumberdaya sebagai salah satu prasyarat kunci untuk menghindari negara dari fenomena *resource curse*.⁴⁶ Merupakan suatu pengertian publik bahwa peningkatan transparansi dalam hal alur pendapatan antara perusahaan minyak dan gas bumi serta pertambangan dengan pemerintah merupakan hal yang diperlukan dalam meningkatkan akuntabilitas dan mengatasi permasalahan korupsi. Berbagai perusahaan dan pemerintah pun telah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan transparansi pada lingkup kegiatannya.

Berbagai inisiatif transparansi sektor migas menekankan kepada keterbukaan informasi keuangan sehingga data-data tersebut dapat diakses oleh publik (*civil society*) sehingga mereka dapat berkontribusi dalam memastikan terjadinya akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan pendapatannya untuk sebesar-besar kepentingan rakyat.⁴⁷ Adapun berbagai inisiatif tersebut antara lain inisiatif *Publish What You Pay* (PWYP), inisiatif transparansi G-8 serta *Extractive Industry Transparency Initiative* atau EITI.

Inisiatif *Publish What You Pay* (PWYP) menekankan kepada pengungkapan alur pembayaran kepada pemerintah oleh berbagai perusahaan yang terdaftar secara publik, sementara inisiatif transparansi G-8 menekankan kepada transparansi atas neraca

⁴⁶ Jerome, Adjibolosoo, Busari (2005), *Is the Push for Transparency Enough?*, dalam *Review of Human Factor Studies* Eds. 11.1 (International Institute for Human Factor Development). hal. 20.

⁴⁷ Alexandra Gillies, *Loc., Cit.*, hal. 7.

keuangan pemerintah serta proses sebelumnya, dimana EITI menekankan pada persetujuan secara sukarela dari pemerintah untuk mengungkapkan alur pendapatannya.⁴⁸

Secara garis besar, berbagai inisiatif transparansi sektor ekstraktif yang berkembang dewasa ini menekankan pada pengungkapan kepada publik mengenai alur pendapatan, pengelolaan pendapatan, pembelanjaan dari pendapatan tersebut serta berbagai operasi yang terjadi pada industri tersebut.⁴⁹

Tabel 2.1 : Berbagai Elemen Transparansi Pada Sektor Ekstraktif

I	Alur Pendapatan
	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemerintah termasuk pajak, royalti, bonus, kontribusi berbentuk barang, dan aktifitas pengembangan masyarakat - Alur pendapatan antar institusi pemerintahan termasuk perusahaan milik negara, instansi pajak dan pembendaharaan. - Jumlah dan prasyarat pinjaman pada proyek-proyek terkait dengan minyak bumi
II	Pengelolaan Pendapatan
	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan-tujuan investasi, pembukuan keuntungan serta penggunaan-penggunaan pendapatan yang berasal dari minyak bumi. - Rekening pemerintah terkait industri ekstraktif beserta mekanisme akses dan penggunaannya.
III	Pembelangan Pendapatan
	<ul style="list-style-type: none"> - Berbagai justifikasi penggunaan serta transparansi dalam proses pengalokasian dana pendapatan dari industri ekstraktif. - Formula alokasi pendanaan, jumlah dan tujuan penggunaan. - Proses pengadaan pemerintah yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
IV	Operasi Industri
	<ul style="list-style-type: none"> - Proses tender yang terbuka dan transparan - Kontrak eksplorasi maupun produksi antara pemerintah dengan perusahaan termasuk perjanjian pembagian hasil produksi dan perjanjian pengelolaan bersama. - Data cadangan dan produksi. - Kalkulasi dan asumsi biaya industri.

⁴⁸ Jerome, Adjibolosoo, Busari (2005), *Loc., Cit.*, hal. 20-22.

⁴⁹ Alexandra Gillies, *Loc., Cit.*, hal. 3.

Lebih jauh lagi, mengenai pembahasan berbagai inisiatif transparansi di atas, bab ini akan mengulas lebih lanjut terutama mengenai inisiatif transparansi *Publish What You Pay* (PWYP) dan *Extractive Industry Transparency Initiative* atau EITI.

2.2 INISIATIF PUBLISH WHAT YOU PAY (PWYP)

Salah satu inisiatif awal mengenai transparansi ialah inisiatif *Publish What You Pay* (PWYP) yang didukung oleh *George Soros Foundation*, *Open Society Institute*, *Global Witness*, *CAFOD*, *Oxfam*, *Save the Children UK*, *Transparency International UK* serta berbagai NGO lainnya pada tahun 2002.⁵⁰ Inisiatif ini menekankan kepada pengungkapan alur pembayaran kepada pemerintah oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar secara publik sebagai salah satu syarat terdaptarnya perusahaan-perusahaan tersebut dalam bursa saham.⁵¹ Dalam mempromosikan inisiatif ini PWYP berkerjasama dengan berbagai kelompok *civil society* di tujuh puluh negara.⁵²

PWYP secara konsisten menuntut agar diakomodasikannya inisiatif ini dalam suatu bentuk legislasi terutama di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Inisiatif ini mendapatkan berbagai penolakan terutama dari kalangan korporasi dikarenakan inisiatif ini tidak mengindahkan atau mempertimbangkan posisi dari *host countries* dan juga tidak dapat diaplikasikan secara universal kepada seluruh perusahaan yang memiliki dan ingin menjalin hubungan bisnis dengan *host countries* tersebut. Namun demikian, PWYP berhasil dalam mempengaruhi berbagai institusi multilateral maupun bilateral untuk menyertakan berbagai persyaratan seperti pengungkapan alur

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 21.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 22. Lihat juga PWYP, *Stock market listing regulations*, <http://www.publishwhatyoupay.org/en/advocacy/stock-market-rules>, diakses pada hari Jum'at 12 November 2010 pukul 21.06 WIB.

⁵² PWYP, *about us*, <http://www.publishwhatyoupay.org/en/about>, diakses pada hari Jum'at 12 November 2010 pukul 22.21 WIB.

pembayaran dan pengungkapan kontrak sebagai persyaratan pinjaman terhadap berbagai proyek di industri ekstraktif.⁵³

Pada level internasional, PWYP mendapatkan kursi pada EITI Board sebagai bagian komposisi *multi-stakeholders* dari dewan tersebut.⁵⁴ PWYP juga memiliki berbagai afiliasi koalisi nasional di dua puluh tiga EITI *candidate countries*, dimana beberapa anggota dari koalisi ini duduk dalam *national multi stakeholders transparency group* yang bertanggung jawab dalam pengimplementasian sekaligus berfungsi sebagai pengawas EITI di negara tersebut.⁵⁵

Di Indonesia, PWYP-Indonesia terdiri dari empat puluh lima NGO Indonesia yang berasal dari berbagai propinsi kaya akan sumberdaya migas dan pertambangan antara lain *Transparency International Indonesia, Bojonegoro Institute, Indonesia Corruption Watch, Indonesian Center For Environmental Law, Pattiro Center for Regional and Information Studies – Pusat Telaah dan Informasi Regional, MATA Aceh, Seknas FITRA, C-Force, FKPMR Riau Community Communication Forum, FOKER LSM Papua NGOs Cooperation Forum, PERDUMAnokwari, Institute for Essential Services Reform, GeRAK Aceh, INFEST Garut, JAGA, JARI, KIPRA PAPUA, Lembaga Penelitian Aplikasi Wacana Blora, LPAD, POSITIF Kalimantan, West Java Corruption Watch, YCHI Banjarbaru, Perkumpulan IDEA, PATTIRO Serang, FITRA Tuban, PCC Tuban, FITRA RIAU, Samdhana Institute, KAR, PADI, Indonesia Parlemtary Center, IREA Gresik, Bandung Institute of Governance Studies* dan

⁵³ Jerome, Adjibolosoo, Busari (2005), *Loc., Cit.*, hal. 21.

⁵⁴ EITI, "The EITI Board", <http://eiti.org/about/board>, diakses pada hari Jum'at 12 November 2010 pukul 23.05 WIB.

⁵⁵ PWYP, "What is the Extractive Industries Transparency Initiative?", <http://www.publishwhatyoupay.org/en/activities/advocacy/extractive-industries-transparency-initiative>, diakses pada hari Jum'at 12 November 2010 pukul 22.40 WIB.

WALHI RIAU.⁵⁶ Koalisi PWYP Indonesia dikepalai oleh seorang *country coordinator* yaitu Bapak Ridaya Laode Ngoke.

2.3 EXTRACTIVE INDUSTRY TRANSPARENCY INITIATIVE (EITI)

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) adalah sebuah inisiatif yang diakui secara internasional mampu menciptakan transparansi dan partisipasi publik dalam mengawasi berbagai transaksi pembayaran di sektor migas dan pertambangan.⁵⁷ Secara esensi, EITI merupakan suatu partisipasi sukarela dari pemerintah, korporasi dan perwakilan *civil society organizations* dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi pada sektor industri ekstraktif di negara tersebut.⁵⁸

Pengagas terhadap pengimplementasian EITI di seluruh dunia dilakukan oleh Dewan EITI Internasional (*EITI Board*) yang saat ini dikepalai oleh Dr. Peter Eigen, pendiri dan mantan ketua dari *Transparency International*.⁵⁹ Dewan tersebut terdiri dari elemen perwakilan dari pemerintahan, perusahaan-perusahaan ekstraktif, organisasi masyarakat madani (*civil society*), investor serta perwakilan dari negara-negara yang memberikan dukungan politis terhadap EITI.⁶⁰ EITI Board juga berfungsi

⁵⁶ PWYP Indonesia, "*National Coalition Publish What You Pay Indonesia*", <http://www.publishwhatyoupay.org/en/where/coalitions/indonesia>, diakses pada hari Jum'at 12 November 2010 pukul 22.32 WIB.

⁵⁷ TI, "*NGO Indonesia dan Para Ahli Keuangan Perminyakan Menuntut Adanya Standar Trasparansi Dalam Upaya Memerangi Korupsi Global*", <http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2008/bulan/01/tanggal/29/id/2343/>, diakses pada hari Jum'at 12 November 2010 pukul 22.27 WIB.

⁵⁸ Jerome, Adjibolosoo, Busari (2005), *Loc., Cit.*, hal. 20.

⁵⁹ EITI, *EITI Fact Sheet 2010*, hal.3.

⁶⁰ *Ibid.*,

sebagai pemberi validasi atas proses implementasi EITI yang telah berlangsung di suatu negara untuk tujuan pencapaian status *candidate* maupun *compliant country*.⁶¹

Badan pengatur tertinggi adalah Pertemuan Negara-Negara Anggota atau dikenal dengan *EITI Global Conference* yang diadakan sekali setiap dua tahun.⁶² Konferensi terakhir diadakan di Doha pada 16-18 Februari 2009 dan dihadiri oleh lebih dari 500 perwakilan termasuk kepala negara, pimpinan perusahaan/CEOs, dan pimpinan organisasi masyarakat madani.⁶³

Badan pelaksana dari keputusan yang telah ditetapkan oleh *EITI Board* serta mengkoordinasikan pengimplementasian EITI secara global, dijalankan oleh sekretariat EITI yang berpusat di Oslo, Norwegia. Sekretariat EITI bertanggung jawab langsung kepada *EITI Board* dan merupakan titik kontak pertama bagi organisasi-organisasi yang terlibat dan tertarik dengan EITI.⁶⁴ Sekretariat EITI didirikan pada tahun 2007 dan dikepalai oleh seorang Kepala Sekretariat yang saat ini dipegang oleh Jonas Moberg, seorang mantan penasihat senior dari *UN Global Impact*.⁶⁵ Secara spesifik, fungsi dari sekretariat EITI antara lain:⁶⁶

- Advokasi dan penjangkauan (*outreach*).
- Mengkomunikasikan serta berbagi pengalaman dengan para pemangku kepentingan.
- Menyelenggarakan konferensi EITI, berkoordinasi dengan negara anggota.

⁶¹ EITI, *EITI Validation*, <http://eiti.org/eiti/validation> diakses pada hari Sabtu 13 November 2010 pukul 18.48 WIB.

⁶² EITI, *The 4th EITI Global Conference*, <http://eiti.org/DohaConference> diakses pada hari Sabtu 13 November 2010 pukul 17.50 WIB.

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ EITI, *The EITI International Secretariat*, <http://eiti.org/about/secretariat> diakses pada hari Sabtu 13 November 2010 pukul 18.11 WIB.

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ *Ibid.*,

- Mengatur pusat data pengelolaan pendapatan dan transparansi.
- Memastikan terlaksananya koordinasi yang baik antara negara-negara pendukung EITI dengan berbagai institusi penyedia asistensi seperti World Bank, African Development Bank serta institusi donor bilateral.
- Mengawasi secara seksama proses implementasi EITI di suatu negara serta mengamati temuan-temuan dalam proses tersebut terkait tujuan validasi.
- Mengarahkan serta menginformasikan negara terkait dalam proses implementasi EITI.

Tabel 2.2 : Badan-Badan EITI



Bilamana suatu negara menandatangani EITI, ia wajib untuk melaporkan jumlah pendapatan yang diterima serta mewajibkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negaranya untuk melaporkan jumlah pendapatan minyak, gas dan mineral yang mereka

bayarkan kepada pemerintah melalui pengawasan komite *multi-stakeholder* yang beranggotakan kalangan pemerintah, masyarakat sipil, serta korporasi dalam pelaporan, pembandingan dan penyebaran informasi mengenai pendapatan tersebut.⁶⁷

EITI dirancang untuk memperbaiki iklim investasi di negara-negara yang melaksanakannya dan memastikan bahwa lebih banyak lagi dana publik yang disediakan untuk mendorong pembangunan. Inisiatif ini juga dimaksudkan untuk menghadapi “kutukan sumberdaya,” dimana penemuan dan produksi minyak, gas, atau mineral di beberapa negara justru tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan rakyat, karena tidak adanya keseimbangan ekonomi, politik, dan keamanan yang menyertai proses tersebut.⁶⁸

Pandangan bahwa perusahaan-perusahaan ekstraktif harus mempublikasikan apa yang mereka bayarkan pada pemerintah, berasal dari berbagai organisasi masyarakat sipil internasional pada pergantian milenium lalu. Berangkat dari gagasan tersebut, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair meluncurkan EITI pada tahun 2002, dengan menambahkan beberapa rumusan—bahwa pemerintah juga harus mempublikasikan apa yang mereka terima dari perusahaan-perusahaan ekstraktif, dan bahwa angka yang dilaporkan masing-masing pihak harus saling diperiksa silang.⁶⁹

Inti EITI adalah proses rekonsiliasi laporan, dimana dalam bentuknya yang paling sederhana mencakup:⁷⁰

- Penyerahan *template* oleh setiap perusahaan minyak, gas, dan pertambangan - termasuk perusahaan-perusahaan milik negara - yang melaporkan jumlah seluruh pendapatan yang dibayarkan kepada, dan semua produksi yang dibagi dengan, pemerintah.

⁶⁷ David W. Brown (EITI Senior Advisor Indonesia), *EITI Scoping Study*, Juni 2008, hal. 3.

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ *Ibid.*,

- Penyerahan *template* oleh setiap instansi pemerintah yang relevan, yang melaporkan tentang besarnya pendapatan dan/atau volume produksi yang mereka terima dari masing-masing perusahaan minyak, gas, atau pertambangan.
- Penunjukan rekonsiliator independen untuk mengecek-ulang angka-angka dalam poin (1) dan (2), dan mengidentifikasi dan menjelaskan setiap perbedaan yang ada.
- Mempublikasikan hasil-hasil poin (1), (2), dan (3).

2.3.1 PRINSIP DAN KRITERIA EITI

Prinsip dan kriteria EITI merupakan suatu pernyataan ringkas mengenai keyakinan dan tujuan dari inisiatif ini yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, pendukung dan negara-negara anggota. Adapun dua belas prinsip EITI antara lain:⁷¹

1. Kami berbagi keyakinan bahwa penggunaan dari kekayaan hasil sumber daya alam dengan prinsip kehati-hatian dapat menjadi lokomotif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*) yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan. Namun demikian, bila tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat menciptakan berbagai dampak negatif pada perekonomian dan kehidupan sosial.
2. Kami menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat merupakan tanggung jawab dari pemerintah yang berdaulat dalam rangka kepentingan pembangunan nasional.

⁷¹ EITI, *The EITI Principles and Criterias*, <http://eiti.org/eiti/principles> diakses pada hari Minggu 14 November 2010 pukul 14.31 WIB.

3. Kami menyadari bahwa keuntungan dari pengelolaan sumber daya merupakan hasil dari pendapatan kumulatif beberapa tahun kebelakang, dan sangat tergantung oleh harga komoditas internasional.
4. Kami menyadari bahwa pengetahuan publik akan berbagai alur pendapatan dan pengeluaran negara, lambat laun akan memberikan jawaban atas debat publik yang muncul serta dapat memberikan informasi akan pilihan-pilihan yang realistis dan semestinya untuk tujuan keberlanjutan pembangunan (*sustainable development*).
5. Kami menekankan pentingnya transparansi untuk dilaksanakan oleh negara dan korporasi dalam industri ekstraktif serta pentingnya peningkatan akuntabilitas dan pengelolaan sektor keuangan publik.
6. Kami menyadari bahwa dalam usaha meningkatkan transparansi harus pula mengindahkan aspek penghormatan terhadap kontrak dan perundang-undangan yang ada.
7. Kami percaya bahwa transparansi dapat membawa peningkatan kondisi investasi baik itu investasi domestik maupun investasi yang berasal dari luar negeri (*foreign direct investment*).
8. Kami percaya pada prinsip-prinsip dan praktek akuntabilitas pemerintah terhadap warganya dalam mengurus berbagai alur pendapatan dan pengeluaran negara.
9. Kami berkomitmen untuk mendorong peningkatan standar-standar transparansi dan akuntabilitas didalam kehidupan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan operasi bisnis.
10. Kami percaya bahwa perlunya suatu pendekatan yang *workable* dan *broadly consistent* dalam usaha pengungkapan alur pendapatan dan pembayaran.
11. Kami percaya bahwa pengungkapan segala alur pembayaran di suatu negara harus melibatkan seluruh operasi perusahaan industri ekstraktif di negara tersebut.

Universitas Indonesia

12. Dalam usaha pencarian berbagai macam solusi, kami percaya bahwa keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan memiliki kontribusi yang sama pentingnya – termasuk pemerintah dan berbagai instansinya, perusahaan-perusahaan industri ekstraktif, perusahaan-perusahaan penyedia jasa, organisasi-organisasi multilateral, organisasi-organisasi finansial, berbagai investor, serta organisasi-organisasi non-pemerintah (*non-governmental organizations*).

Lebih jauh lagi, implementasi EITI harus konsisten dengan enam kriteria seperti tersebut dibawah ini:⁷²

1. Publikasi (yang komprehensif, mudah didapat, mudah dipahami) secara berkala kepada publik mengenai apa yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada negara menyangkut segala hal terkait dengan minyak bumi, gas alam serta pertambangan, dan segala pendapatan yang diterima oleh negara dari perusahaan-perusahaan minyak, gas bumi dan pertambangan.
2. Bilamana data-data tersebut belum tersedia, segala alur pembayaran dan pendapatan merupakan subjek dari sebuah badan audit independen yang kredibel serta menerapkan standar-standar auditing internasional.
3. Segala data mengenai alur pembayaran dan pendapatan direkonsiliasi oleh sebuah administrator independen yang kredibel dengan menerapkan standar-standar auditing internasional. Administrator independen tersebut juga berwenang untuk mempublikasikan opininya mengenai hasil rekonsiliasi termasuk jika ditemukan adanya ketidakcocokan (*discrepancies*) antara alur-alur tersebut.
4. Pendekatan ini mencakup seluruh perusahaan termasuk perusahaan milik negara (BUMN).

⁷² *Ibid.*,

5. Organisasi masyarakat madani (*civil society*) terlibat sebagai salah satu peserta dalam perumusan, pengawasan dan evaluasi terhadap proses ini dan turut serta berkontribusi terhadap debat publik.
6. Suatu rencana kerja berkelanjutan dan dapat diketahui oleh publik atas poin-poin di atas, disiapkan oleh pemerintah tuan rumah (*host government*) dengan asistensi dari lembaga keuangan internasional (*internastional financial institutions*) – termasuk target pencapaian yang terukur, periodisasi waktu implementasi dan kajian atas potensi hambatan-hambatan terkait dengan kapasitas kelembagaan.

2.3.2 IMPLEMENTASI EITI DI TATANAN GLOBAL

Dalam pengimplementasian EITI secara global, berdasarkan data sampai dengan bulan Oktober 2010, lima negara telah masuk kedalam kategori *Compliant Countries* serta telah menerbitkan laporannya mengenai EITI; Azerbaijan, Ghana, Liberia, Mongolia dan Timor Leste.⁷³ Dua puluh delapan negara telah mencapai kategori *Candidate Countries*; Afghanistan, Albania, Burkina Faso, Pantai Gading, Norwegia, Iraq, Mali, Mauritania, Madagaskar, Kamerun, Mozambique, Republik Afrika Tengah, Niger, Nigeria, Chad, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Guinea (ditunda), Peru, Gabon, Iraq, Togo, Kazakistan, Kirgistan, Tanzania, Yaman, Zambia serta Indonesia yang telah diterima menjadi EITI *candidate country* pada tanggal 19 Oktober 2010.⁷⁴ Sedangkan empat negara lainnya seperti Etopia, Ukraina, Equatorial

⁷³ EITI, *Compliant Country*, <http://eiti.org/countries/compliant>, diakses pada hari Sabtu 13 November 2010 pukul 16.51 WIB.

⁷⁴ EITI, *Candidate Country*, <http://eiti.org/candidatecountries>, diakses pada hari Sabtu 13 November 2010 pukul 17.06 WIB. Lihat juga EITI, *Indonesia accepted as EITI Candidate country*, <http://eiti.org/news-events/indonesia-accepted-eiti-candidate-country> diakses pada hari Minggu 7 November 2010 pukul 15.15 WIB.

Guinea serta Sao Tome and Principe telah memberikan komitmennya untuk mengimpelentasikan EITI.⁷⁵

Dari sisi korporasi, empat puluh enam perusahaan internasional yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi serta pertambangan telah memberikan dukungannya dan berpartisipasi aktif dalam proses pengimplementasian EITI (melalui kegiatan operasinya di berbagai negara yang telah mengimplementasikan EITI), komitmen tingkat internasional, dan melalui berbagai asosiasi industri. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain BHP Billiton, ExxonMobil, BP, Chevron Corporation, ConocoPhillips, Shell, Total, Statoil, DeBeers, Eni, Freeport-McMoRan Copper & Gold, Hess Corporation, Marathon, Mitsubishi Materials, Newmont, Nippon Mining & Metals, Petrobras, Qatar Petroleum, Rio Tinto, Santos, Sumitomo Metal Mining, Talisman Energy dan Woodside.⁷⁶

EITI juga didukung oleh delapan puluh institusi investasi global yang secara kolektif mengelola dana sebesar US\$ 16 triliun. Institusi-institusi investasi global tersebut antara lain *ABP Investments, Allianz Global Investors, Aviva Investors, Baillie Gifford & Co, Bâtirente, Boston Common Asset Management, CPP Investment Board, DnB Nor Asset Management/Carlson Investment Management, Folksam Insurance Group, Goldman Sachs Asset Management International, HSBC, ING Investment Management, JPMorgan Asset Management, PGGM, Rio Tinto Pension Investments Ltd., Schroders Investment Management* serta *Standard Life Investments*.⁷⁷

⁷⁵ EITI, *EITI Countries*, <http://eiti.org/countries>, diakses pada Hari Sabtu 13 November 2010 pukul 17.11 WIB.

⁷⁶ EITI, *Supporting Companies*, <http://eiti.org/supporters/companies> diakses pada hari Sabtu 13 November 2010 pukul 17.15 WIB.

⁷⁷ EITI, *Institutional Investors*, <http://eiti.org/supporters/investors> diakses pada hari Kamis 13 Mei 2010, pukul 12.41 WIB.

Mengenai partisipasi dari berbagai organisasi masyarakat madani (*civil society*) dalam mempromosikan EITI disampaikan melalui kampanye *Publish What You Pay* (PWYP) yang diprakarsai oleh Transparency International dan George Soros pada tahun 2002, dan didukung oleh lebih dari 300 Lembaga Sosial Masyarakat (LSM/NGO) di seluruh dunia seperti antara lain Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD), Georgia Revenue Watch dan koalisi NGO untuk transparansi keuangan publik, Global Witness, Oxfam, Open Society Institute, Revenue Watch Institute, Secours Catholique (Caritas) serta Transparency International.⁷⁸

International Financial Institutions (IFIs) yang memberikan dukungan terhadap EITI antara lain *The World Bank Group* (WBG), IMF, *African Development Bank*, *Asian Development Bank*, *the Inter-American Development Bank*, *the European Bank for Reconstruction and Development*, *KfW Bankengruppe* serta *the European Investment Bank*.⁷⁹ EITI juga didukung oleh berbagai organisasi internasional seperti PBB, G-8, *African Union*, *the International Organization of the Francophonie* (OIF), *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) serta Uni Eropa.⁸⁰

Merujuk kepada proses pengimplementasian EITI di Nigeria, pemerintah Nigeria telah mengeluarkan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif Nigeria (NEITI) pada bulan Mei 2007.⁸¹ Hal tersebut membuat Nigeria menjadi negara pertama yang memberikan landasan berupa undang-undang pada program EITI-nya. Undang-Undang ini menuntut pelaporan tahunan, membentuk Sekretariat NEITI sebagai entitas hukum tetap, menggariskan aturan-

⁷⁸ EITI, *Civil Society*, <http://eiti.org/supporters/civilsociety> diakses pada hari Sabtu 13 November 2010 pukul 17.25 WIB.

⁷⁹ EITI, *Financing Institutions*, <http://eiti.org/supporters/organisations> diakses pada hari Sabtu 13 November 2010 pukul 17.30 WIB.

⁸⁰ EITI, *Supporting International Organization*, <http://eiti.org/supporters/organisations> diakses pada hari Sabtu 13 November 2010 pukul 17.34 WIB.

⁸¹ EITI, *EITI Guidelines for Legislator* (EITI Sekretariat: 2009), hal. 48.

aturan dan prosedur untuk menunjuk anggota *multi-stakeholders group* (MSG) dan mendefinisikan secara hukum peran dari MSG. Undang-Undang ini juga memperkuat NEITI dengan membuat pelaporan perusahaan dan pemerintah wajib (yang tidak mematuhi dapat dikenai sanksi), mengharuskan laporan audit diperiksa oleh Auditor Jenderal (semacam BPK), mengharuskan laporan audit disampaikan kepada Majelis Nasional dan mengharuskan adanya laporan kegiatan NEITI dua kali setahun kepada Majelis Nasional.⁸²

Untuk meninjau, memperbaiki, dan menetapkan RUU NEITI, Majelis Nasional menggalang dukungan dan kepakaran dari LSM, para pakar EITI dan organisasi-organisasi internasional. Untuk menganalisis dan memahami RUU NEITI dengan lebih baik, Komisi Senat untuk Pembentukan dan Pelayanan Publik dari Majelis Nasional mengadakan retreat untuk membahas ketentuan-ketentuannya. Anggota-anggota komisi, dengan dukungan dari organisasi internasional, mengundang staf Sekretariat NEITI dan perwakilan Bank Dunia untuk memberikan pengarahan pada mereka tentang bagian-bagian utama dari legislasi tersebut. Pakar-pakar legislatif internasional bekerja dengan mereka untuk menganalisis setiap bagian dari RUU tersebut. Sebuah UU EITI juga memperkuat peran lembaga legislatif dalam EITI. Dalam proses penyusunan, pembahasan, dan peninjauan Undang-Undang, para legislator dapat membentuk programnya untuk memastikan bahwa itu mencerminkan keadaan negara mereka, secara akurat menyuarakan kebutuhan warga serta melengkapi undang-undang dan program lain terkait industri ekstraktif. Yang terpenting, sebuah UU akan memperkuat peran pengawasan formal dari lembaga legislatif atas EITI.⁸³

Lebih jauh lagi, dalam implementasi EITI di tatanan global, sejumlah negara pun turut memberikan dukungan politik terhadap pengimplementasian EITI, Negara-negara

⁸² *Ibid.*,

⁸³ *Ibid.*,

tersebut antara lain Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, Qatar, Inggris dan Amerika Serikat.⁸⁴ Negara-negara ini memberikan dukungan teknis maupun politis dalam mempromosikan EITI, memberikan kontribusi finansial terhadap kesekretariatan EITI Internasional serta turut mendukung implementasi EITI melalui hubungan bilateral maupun melalui dana perwalian (*multi-donor trust fund*) yang dikelola oleh Bank Dunia.⁸⁵

2.3.2.1 Multi Donor Trust Fund (MDTF)

Multi Donor Trust Fund (MDTF) terhadap *Extractive Industry Transparency Initiative* (EITI) dicanangkan pada bulan Agustus 2004 melalui suatu kesepakatan antara Pemerintah Inggris (*Department for International Development/DFID*) dengan World Bank, diikuti oleh Pemerintah Jerman pada tahun 2006, Australia, Belgia, Kanada dan Spanyol pada tahun 2007, Amerika Serikat dan Uni Eropa di tahun 2008, serta Finlandia dan Swiss pada tahun 2009.⁸⁶ Suatu *Memorandum of Understanding* kemudian ditandatangani antara MDTF dengan Sekretariat EITI Internasional pada awal tahun 2008.⁸⁷

Tujuan dari MDTF antara lain untuk memperluas dukungan terhadap prinsip-prinsip EITI dan proses pengimplementasian EITI di negara-negara yang telah memperoleh status *EITI Countries* melalui berbagai program kerjasama antara

⁸⁴ EITI, *Supporting Countries*, <http://eiti.org/supporters/countries> diakses pada hari Sabtu 13 November 2010 pukul 17.40 WIB.

⁸⁵ EITI, *The EITI Multi Donor Trust Fund*, <http://eiti.org/about/mdtf> diakses pada hari Sabtu 13 November 2010 pukul 17.45 WIB.

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ *Ibid.*,

pemerintah, sektor swasta dan *civil society*.⁸⁸ Dalam pelaksanaannya, MDTF dikelola oleh World Bank (melalui *The Global Partnership & Trust Fund Operations Department/CTPFO*) dengan mengatasnamakan negara-negara pendonor.⁸⁹

MDTF-EITI diarahkan oleh sebuah Komite yang terdiri dari satu orang perwakilan dari World Bank serta perwakilan dari tiap-tiap negara donor yang mana masing-masing berkomitmen sebesar US\$ 500,000 atau lebih, dan diharapkan dapat terkumpul pada 31 Desember 2010.⁹⁰ Adapun jadwal-jadwal pertemuan dari Komite ini diorganisir oleh World Bank (dua kali dalam satu tahun), dimana keputusan yang dihasilkan oleh Komite merupakan suatu keputusan bersama antara negara donor dengan World Bank.

Berbagai keputusan strategis mengenai prioritas dan kebijakan serta persetujuan program kerja satu tahun kedepan, ditetapkan pada suatu pertemuan tahunan disekitar bulan April atau Mei, dimana agenda-agenda rapat tak-terjadwal (spesial) dapat diselenggarakan berdasarkan permintaan baik itu dari negara donor ataupun World Bank.⁹¹ Adapun revisi mengenai jumlah dana program kerja yang melebihi US\$ 50,000 membutuhkan persetujuan dari Komite sedangkan program kerja dengan jumlah dana dibawah US\$ 50,000 merupakan wewenang dari World Bank untuk memutuskan.⁹²

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ The World Bank, *Global Partnership and Trust Fund Operations*, <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/CFPEXT/0,,contentMDK:20135627~menuPK:64060203~pagePK:64060249~piPK:64060294~theSitePK:299948,00.html> diakses pada hari Minggu 14 November 2010 pukul 13.10 WIB.

⁹⁰ EITI, *The EITI Multi Donor Trust Fund*, <http://eiti.org/about/mdtf> diakses pada hari Minggu 14 November 2010 pukul 13.20 WIB.

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² *Ibid.*,

Tabel 2.3 : Kontribusi Negara Donor terhadap MDTF

Donor Contributions			
As of 30 March 2010. All amounts in US\$ million.			
Donor	Amount incepted	Amount committed	Total
Australia (AUSAID)	1.2		1.2
Belgium (DGDC)	0.7		0.7
Canada (CIDA)	0.9	1.5	2.4
EU (European Commission)	0.8		0.8
Finland (MFA)	0.4	0.7	1.1
France (MEFI)	1.6		1.6
Germany (BMZ)	1.3	0.7	2.0
The Netherlands (MDC)	1.5		1.5
Norway (MFA)	1.2	0.2	1.4
Spain (MFA)	2.2	1.5	3.7
Switzerland (FDEA)		1.5	1.5
United Kingdom (DFID)	6.5		6.5
United States (USAID)	6.0		6.0
Investment income	0.3		0.3
TOTAL	24.7	6.1	30.8

MDTF sampai dengan saat ini telah mendanai berbagai aktifitas di lebih dari dua belas negara dimana EITI telah diimplementasikan di lebih dari sepuluh negara.⁹³ Dana hibah yang disalurkan oleh World Bank kepada negara tertentu, dilaksanakan melalui mekanisme penandatanganan kesepakatan yang mencakup definisi dari berbagai aktifitas yang akan dilaksanakan oleh negara tersebut.⁹⁴ Lebih jauh lagi, kegunaan dari MDTF antara lain:⁹⁵

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ *Ibid.*,

1. Mendanai berbagai aktifitas terutama menyangkut enam kriteria dasar dari EITI.
2. Mendanai aktifitas global dalam rangka mengkoordinasikan, menyebarkan, menerbitkan hasil-hasil ataupun berbagai informasi spesifik serta berbagai panduan bagi pengimplementasian EITI di tingkatan nasional.
3. Mendanai berbagai aktifitas EITI di negara-negara yang belum menjalankan proses implementasi EITI namun telah memberikan komitmen politis untuk mengimplementasikan EITI sebelum tanggal 31 Desember 2010.

Tabel berikut merupakan rencana kerja dari MDTF untuk periode 2010-2011 berikut rincian alokasi dana tersebut di berbagai negara.⁹⁶



⁹⁶ World Bank, *EITI Implementation Report 2010* (World Bank: February 2010), Hal.35.

Tabel 2.4: Program Kerja MDTF 2010-2011

EITI Technical Assistance Work Program -Country Portfolio Summary					
Also showing MDTF FY1011 work program including countries. EITI implementation stage and validation status shown in shaded ^{1/} columns					
Countries which have adopted EITI (or have endorsed EITI publicly) of which:				Interested countries – in dialogue	
EITI compliant 1/	EITI candidate 1/				
Implementing EITI (Validated as compliant and issued EITI Reports) (2 countries)	Implementing EITI (to stage of having issued one or more EITI Reports (14 countries)	EITI implementation in progress (to produce and issue first EITI Report) (14 countries)	Endorsed EITI (with some making progress towards candidate status) (10 countries)	Pipeline countries included in COCPO MDTF work program (5 countries)	Other countries that WBG or donors are in contact with (4 countries)
Azerbaijan	Cameroon *	Yemen *	Botswana	Angola	Sudan
Liberia*	Gabon	DR Congo*	Chad	Uganda	
	Ghana *	Equatorial Guinea*	Togo +		
	Guinea *	Madagascar*	Ethiopia		
	Kazakhstan *	Sao Tome e Principe *		Cambodia	Lao PDR
	Kyrgyz Republic *	Sierra Leone*	Indonesia +	Papua New Guinea	Philippines
	Mauritania *	Timor Leste *		Solomon Islands	Vietnam
	Mongolia *		Ukraine		
	Nigeria*	Cote d'Ivoire *			Bulgaria
		Tanzania	Colombia		
	EITI Reports issued in 2009:	Norway	Trinidad and Tobago		Egypt
	Central African Rep *	Albania	Iraq +		
	Rep of Congo	Burkina Faso**			
	Peru *	Mozambique	Afghanistan		
	Mali (draft)*	Zambia**			
	Niger (draft)*				
By WBG Region:					
AFR 1 country	AFR 10 countries	AFR – 10 countries	AFR 4 countries	AFR 2 countries	AFR – 1 country
EAP	EAP 1	EAP – 1	EAP 1	EAP 3	EAP 3
ECA 1 country	ECA 2	ECA – 1	ECA 1		ECA 1
LAC	LAC – 1	LAC	LAC 2		MNA 1
MNA		MNA 1	MNA – 1		
SAR		OECD 1	SAR 1		

1/ = by decision of EITI Board, as reflected on International EITI web site. Candidate countries expected to complete validation process (for EITI-compliant status) within two years.

MDTF grant status to country (countries in italics are shown for completeness -limited or no EITI MDTF-related technical assistance (but other EI sector engagement by WBG in place)

* = EITI MDTF grant to country **in place and under execution**

** = EITI MDTF grant to country **in process** through WB Legal Dept. etc – i.e. request for trust fund grant received and trust fund agreement is in progress (to be signed in next 1-3 months)

+ = Pipeline – working towards EITI candidacy– MDTF grant proposal activities will then be agreed (i.e. MDTF trust fund grant agreement not likely for next 3-4 months)

++ = EITI MDTF grant unlikely for the present (EITI implementation funded mainly by Government and/or via other World Bank and/or bilateral donor projects or project components)

Universitas Indonesia

2.3.3 IMPLEMENTASI EITI DI TATANAN NASIONAL

Pelaksanaan EITI di tingkat negara mencakup tiga tahap. Pada tahap pertama, negara-negara menunjukkan minat mereka. Tahap kedua dimulai dengan pemenuhan syarat-syarat kandidat (*candidacy*) dan mencakup upaya-upaya memenuhi kepatuhan penuh. Tahap ketiga ditandai dengan pencapaian kepatuhan penuh (*compliance*).⁹⁷

1. Dalam hal menunjukkan minat, beberapa langkah harus diambil pemerintah tuan rumah (*host government*) yang meliputi:
 - Penandatanganan EITI secara terbuka, yang biasanya dilakukan pejabat pada tingkat Menteri atau di atasnya.
 - Membuat komitmen untuk bekerja bersama-sama dengan masyarakat sipil dan perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan EITI.
 - Menunjuk seorang pejabat senior untuk memimpin pelaksanaan EITI.
 - Mempublikasikan sebuah rencana kerja yang dibiayai secara penuh yang memuat target-target terukur dan jadwal pelaksanaan.
2. Setelah melaksanakan langkah-langkah di atas, maka sebuah negara memenuhi syarat-syarat kandidat. Pada tahap kedua, langkah-langkah tambahan akan ditempuh oleh negara untuk mencapai kepatuhan penuh dengan EITI. Langkah-langkah ini mencakup hal-hal berikut (tetapi tidak terbatas pada):
 - Pembentukan Kelompok Pengarah *Multi-stakeholder* Nasional (*National Multi-stakeholder Steering Group/SG*) dengan dukungan peraturan yang memadai.
 - Peningkatan kemampuan pemerintah dan masyarakat sipil, sehingga dapat mendukung partisipasi penuh mereka dalam EITI.
 - Pelaksanaan proses rekonsiliasi laporan.

⁹⁷ David W. Brown (EITI Senior Advisor Indonesia), *EITI Scoping Study*, Juni 2008, hal. 3.

- Membuat hasil-hasil proses rekonsiliasi laporan terbuka untuk publik, yang didukung oleh program komunikasi.
- Memanfaatkan validator eksternal dua tahun setelah pemenuhan syarat-syarat kandidat, dan setiap dua tahun sesudahnya, untuk mengevaluasi kemajuannya.⁹⁸

3. Segera setelah sebuah negara melewati seluruh proses di atas, maka negara ini akan dinilai oleh para validator apakah ia telah mematuhi EITI secara penuh.

Sebagian besar negara yang menerapkan EITI mendirikan sebuah sekretariat nasional yang terdiri dari staf administratif, staf komunikasi serta pakar industri ekstraktif.⁹⁹ Biasanya kantor sekretariat nasional EITI terdapat pada badan atau departemen pemerintah tertentu. Di Peru, misalnya, sekretariat EITI berkedudukan di Departemen Energi dan Tambang; di Kamerun, sekretariat nasional EITI berlokasi di dalam Departemen Perekonomian dan Keuangan.¹⁰⁰ Sejumlah negara juga telah membentuk kelompok kerja lintas pemerintah untuk mengkoordinasikan partisipasi pemerintah.¹⁰¹ Dengan kata lain, tujuan utama dari dibentuknya sekretariat nasional EITI ialah untuk mendukung kerja Kelompok Pengarah EITI dalam hal mengelola aspek-aspek administratif dari implementasi EITI, sehingga kelompok pengarah hanya perlu mengadakan pertemuan secara periodik untuk membuat keputusan-keputusan.¹⁰²

⁹⁸ Sekretariat EITI memiliki sebuah daftar validator EITI yang disetujui.

⁹⁹ David W. Brown, *EITI Scoping Study*, hal. 43.

¹⁰⁰ *Ibid.*,

¹⁰¹ *Ibid.*,

¹⁰² *Ibid.*,

Tabel 2.5: Tahapan-tahapan implementasi EITI¹⁰³

Dengan demikian, bab ini telah menjelaskan berbagai inisiatif transparansi sektor industri ekstraktif yang berkembang di dunia dewasa ini antara lain inisiatif *Publish What You Pay* (PWYP), inisiatif transparansi G-8 dan Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) itu sendiri. Dari berbagai inisiatif tersebut, EITI lebih mendapatkan dukungan dari para *stakeholders* (pemerintah, bisnis, institusi donor

¹⁰³ EITI, *EITI Fact Sheet 2010*, hal.3.

internasional dan *civil society*) dikarenakan EITI menekankan pada pernyataan kesediaan secara sukarela terlebih dahulu dari pemerintah sebagai regulator industri ekstraktif untuk mengungkapkan alur pendapatan yang diterimanya dari komunitas sektor industri ekstraktif di negara tersebut, dimana inisiatif PWYP menekankan kepada pengungkapan alur pembayaran kepada pemerintah oleh berbagai perusahaan yang terdaftar secara publik tanpa perlunya persetujuan pemerintah terlebih dahulu mengenai pengungkapan berbagai informasi tersebut. Pola pengungkapan seperti itu membahayakan hubungan bisnis yang telah terjalin antara komunitas bisnis dengan pemerintah dikarenakan di beberapa negara pengungkapan data dan informasi mengenai pengelolaan industri ekstraktif merupakan hal yang tabu untuk dilakukan.

Sementara inisiatif transparansi G-8, menekankan kepada transparansi atas neraca keuangan pemerintah serta proses sebelumnya, dimana terkesan terlalu mengintimidasi. Dengan demikian, EITI merupakan suatu mekanisme jalan tengah yang dapat diterima oleh berbagai *stakeholders* terkait dalam hal pengimplementasian aspek transparansi pada sektor industri ekstraktif. Sifat keanggotaannya EITI yang sukarela juga berkontribusi terhadap pesatnya pengakomodasian EITI terutama di negara-negara *resource rich*.